

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19
DI DESA KOTA INTAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :
YOLA HERMEINA
NPM : 177310097

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

4. Bapak Rizky Setiawan,S,IP,M.SI sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau, semoga ilmu yang Ibu dan Bapak berikan dapat bermanfaat dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dan seluruh staff serta Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Teristimewa orang tua penulis Omak dan Ayah, Abang-abang, Kakak-Kakak, dan Benny Septian yang memberikan kasih sayang yang tiada banding serta sebagai support system dan selalu memberikan dukungan baik moral dan juga moril tiada henti terhadap penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 terutama my bestie , Memey selaku kang edit yang sedia setiap saat membantu, Nurhasanah sebagai partner bimbingan, Upa yang selalu menyemangati serta Gadis dan Deby sebagai pendorong yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

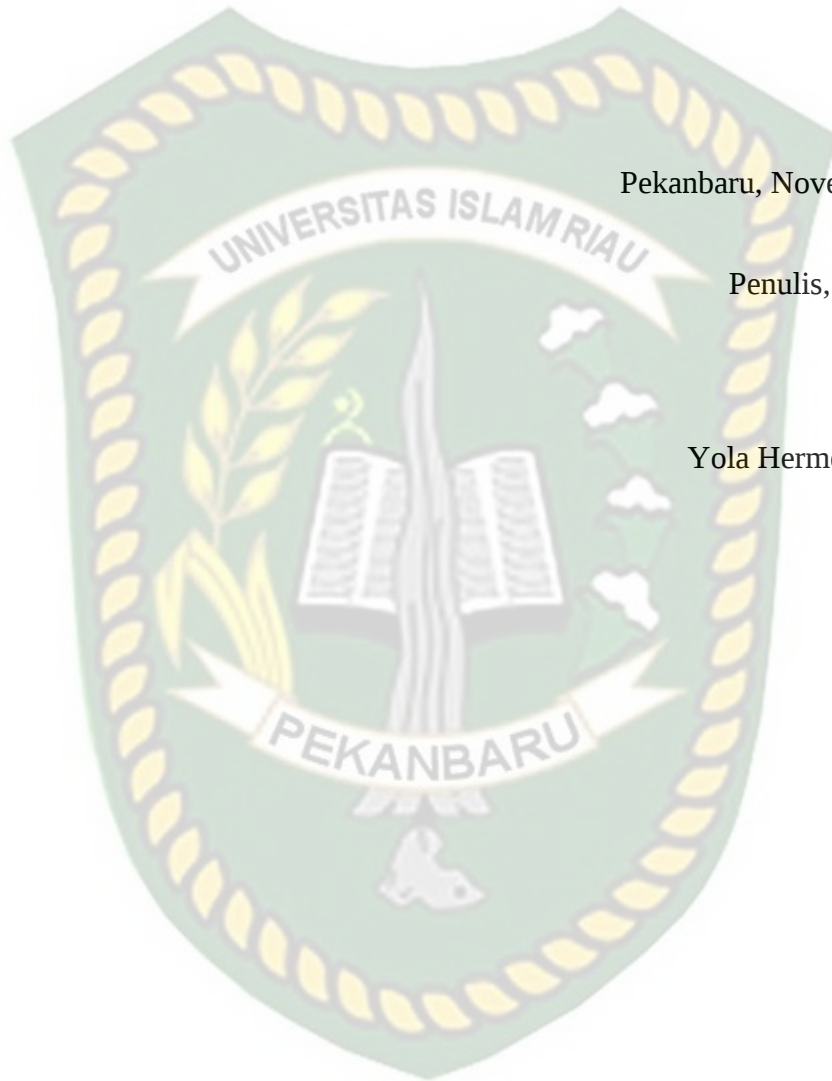
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

Yola Hermeina



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	11
2.1 Studi Kepustakaan	11
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pikir	33
2.4 Operasional Konsep	35
2.5 Operasional Variabel	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Informen	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik pengumpulan data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.7 Jadwal waktu penelitian	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	42
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kunto Darussalam	48
4.3 Gambaran Umum Desa Kota Intan	49
BAB V PEMBAHASAN	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Amprah penerimaan Bantuan Langsung Tunai bulan juli tahun 2020 desa Kota Intan	7
Tabel 1.2 Data Bantuan pkh di desa kota intan	7
Tabel 1.3 Dana bantuan sosial tunai di desa kota intan	8
Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu	32
Tabel 2.2 Operasional variabel tentang Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	37
Tabel 3.1 Informen tentang Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan hulu.	39
Tabel 3.2 jadwal waktu penelitian tentang Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	41
Tabel 5.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin penelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	54
Tabel 5.2 Umur informan pemnelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	55
Tabel 5.3 Tingkat pendidikan informan penelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi wawancara.....	76
Lampiran 2 : Draf wawancara	79
Lampiran 3 : Surat Riset	87



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini

Nama : Yola Hermeina

NPM : 177310097

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Usulan Penelitian : Efektifitas Bantuan Langsung Tunai covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan

1. Bahwa naskah Ujian Komprehensif ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, November 2021

Pelaku Pernyataan,


Yola Hermeina



**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID 19
DI DESA KOTA INTAN KECAMATAN KUNTODARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRACT

Yola Hermeina

177310097

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas program bantuan langsung tunai covid 19 di desa kota intan kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu. Indikator penelitian yang di gunakan penulis pada penelitian ini ada 5(lima) yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran,kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Tipe penilitian yang berlokasi di desa kota intan kecamatan kunto Darussalam kabupaten rokan hulu di gunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke kantor kepala desa agar dapat fenomena yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pngambilan informan mengguakan purposive sampling karna informan yang di ambil tersebut memiliki informasi yang perlukan mengenai bantuandan ikut terlibat langsung dalam Bantuan Langsung Tunai di desa kota intan kecamaran kunto Darussalam kabupaten rokan hulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di peroleh hasil bahwa efektivitas program bantuan langsung tunai covid 19 di desa kota intan kecamatan kunto Darussalam kabupaten rokan hulu berjalan dengan efektif hal ini dikarnakan pemilihan yang secara menyeluruh dan adil terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan dan masyarakat juga merasa terbantu akan adanya bantuan.

Kata kunci: efektifitas,program, blt

**THE EFFECTIVENESS OF THE COVID 19 DIRECT CASH
ASSISTANCE PROGRAM IN KOTA INTAN VILLAGE,
KUNTODARUSSALAM DISTRICT, ROKAN HULU REGENCY**

ABSTRACT

Yola Hermeina

177310097

This study aims to determine and explain the effectiveness of the COVID-19 direct cash assistance program in the village of Kota Intan, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. There are 5 (five) research indicators used by the author in this study, namely: program success, target success, satisfaction with the program, input and output levels, overall goal achievement. The type of research located in the village of Kota Intan, Kunto Darussalam district, Rokan Hulu district, used qualitative descriptive analysis research methods. Where to conduct research directly to the village head's office so that existing phenomena can be based on actual facts when researching using this type of research with interviews, observation and documentation. The technique of collecting informants used purposive sampling because the informants who were taken had the necessary information about assistance and were directly involved in Cash Direct Assistance in the village of Kota Intan, Kecamatan Kunto, Darussalam, Rokan Hulu Regency. Based on the research conducted, it was found that the effectiveness of the COVID-19 direct cash assistance program in the village of Kota Intan, Kunto District, Darussalam, Rokan Hulu Regency was running effectively, this was due to a thorough and fair election to the community so that the underprivileged people would get it and the community also felt helped by the assistance.

Keywords: effectiveness, program, blt

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alenia keempat undang-undang dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Indonesia termasuk Negara yang dalam 15 besar progresif menurunkan tingkat kemiskinan, resiko peningkatan angka kemiskinan yang masih juga menghantui manusia. Hal ini lantaran banyak orang berada nyaris diambang batas garis kemiskina dan dan rentan miskin, bantuan social yang lebih luas diperlukan guna menopang kesejahteraan masyarakat.

Menurut Juwanita (2004) Kemiskinan dapat di artikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika diartikan sebagai pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum maka orang ni dapat dikatakan kurang mampu.

Pada Desember 2019 dunia dikejutkan dengan ditemukannya virus baru yang di namakan dengan virus *Corona V Disease*. Virus ini ditemukan di pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir keseluruhan Negara di Dunia ini hanya dalam waktu beberapa bulan Virus ini menyebar.

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu) Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic *Corona Virus Disease 2019* di desa, di mana di tentukan bahwa melalui penggunaan dana desa dapat di gunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk kurang mampu di desa.

Indonesia termasuk Negara yang telah tertular ini. Kasus pertama kali di Indonesia terjadi pertama kali pada awal marat 2020 dan penyebarannya sangat cepat. Tidak hanya di Indonesia, penyebaran Corona juga berkembang pesat di hampir seluruh negara di Dunia.

Hal tersebut membuat seluruh negara berada dalam khawatir akan lebih berkembangnya virus corona tersebut. Khawatiran tersebut, membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah dan menghambat penyebaran virus corona. Indonesia juga melakukan hal yang sama, demi mencegah penyebaran virus ini Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Untuk menghambat Virus Corona.

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat banyak masyarakat di Indonesia merasakan dampaknya, terutama

karena adanya pembatasan kegiatan di luar rumah bagi masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kesulitan untuk beraktifitas terutama bagi masyarakat yang bekerja untuk mencari nafkah tentu saja dengan kebijakan ini semuanya jadi terhambat. Dengan begitu banyaknya pertimbangan terhadap dampak ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat kecil, salah satu bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai.

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian di Indonesia tidak terkecuali, akibat pendemik ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggara yang ada. Dan salah satu pos anggaran juga di lakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana Desa yang sebenarnya di peruntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, di alihkan menjadi dana bantuan tunai yang di namakan dengan bantuan langsung tunai dana desa. Implementasi program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang secara tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat yang tergolong dalam keluarga yang di bawah. Negara yang pertama kali memprakarsi Bantuan Langsung Tunai adalah Brazil, dan selanjutnya di adopsi oleh Negara- negara lainnya. Besaran dana

yang di berikan dan mekanisme yang di jalankan dalam program berbeda-beda tergantung keijakan pemerintah di negara tersebut.

Indonesia juga merupakan Negara penyelenggara Bantuan Langsung Tunai, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan : Hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Bantuan Langsung Tunai dilakukan pertamakali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai ini di anggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

Beberapa permasalahan terjadi dalam penyaluran BLT. Dari segi penyaluran, banyak terjadi kericuhan dalam pembagian dana. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai di Indonesia pada umumnya dan desa kota intan pada khususnya, perlu dianalisis dengan menyoroti proses mekanisme dalam implementasi tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menentukan prioritas penerima bantuan.

Perbandingan Bantuan Langsung Tunai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Lain Berdasarkan Perspektif Penerima Program penanggulangan kemiskinan yang diterima masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni:

1. program sosial/karitatif atau program bantuan dan perlindungan sosial untuk kelompok tertentu seperti Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin, jaminan kesehatan masyarakat, dan Bantuan Operasional Sekolah.
2. program pemberdayaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
3. program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut perspektif mayoritas responden penerima dan nonpenerima program, Bantuan Langsung Tunai merupakan program yang paling baik di antara program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dasar hukum peraturan menteri desa PDTT No.6 tahun 2020 tentang perubahan menteri desa, PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sasaran penerima bantuan langsung tunai (BTL) adalah keluarga miskin non PKH/bantuan pangan non tunai (BPNT) antara lain:
 1. kehilangan mata pencarian
 2. belum terdata
 3. mempunyai rentan keluarga yang sakit
- b. Mekanisme pendataan
 1. Oleh relawan desa lawan covid 19
 2. Basis pendataan di RT dan RW

3. Musdes khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh kepala desa.
4. Pengesahan oleh bupati/walikota atau camat selambatnya 5 hari kerja.

Bantuan Langsung Tunai ini didapati oleh masyarakat di setiap Desa. Salah satunya desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Warga Desa Kota Intan ini termasuk salah satu desa yang memiliki warga yang kurang mampu lumayan banyak.

Bantuan langsung tunai di desa kota intan di berikan pada bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp.600.000,-banyaknya masyarakat tersebut mendapatkan bantuan dari orang tua sampai yang telah berkeluarga. Setelah adanya corona banyak sekali bantuan yang di dapat oleh masyarakat setempat salah satunya Bantuan Langsung tunai.

Daerah kota intan memiliki 3 dusun yaitu dusun sei rumanio, sei merah, dan manggis sebatang. Setiap dusun mendapatkan Bantuan Langsung Tunai bagi yang kurang mampu. Setiap bulan Bantuan Langsung Tunai tersebut di bagi kan di kantor desa.

Adanya manfaat Bantuan Langsung Tunai ini bagi orang yang kurang mampu, dikarenakan pandemi yang menipa masyarakat mengakibatkan tidak dapat bekerja dan penghasilan menurun dikarenakan semua serba tutup dari sekolahan sampai pekerjaan berdiam diri dirumah. Salah satu manfaatnya bisa menyejahterakan dan meringankan beban untuk masyarakat di desa.

Masyarakat penerimaan Bantuan Langsung Tunai perdusun di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan hulu. Dibawah ini yang menerima bantuan sudah ada namanya sebelum dibagikan bantuan berupa uang tersebut.

Tabel 1.1 Amprah penerimaan Bantuan Langsung Tunai bulan juli tahun 2020 desa Kota Intan

No	Dusun	Jumlah Penerima	Jumlah Tidak Menerima
1	Sei merah	50 kk	332 kk
2	Sei rumanio	66 kk	194 kk
3	Manggis sebatang	56 kk	242 kk
Jumlah		172 kk	768 kk

(Sumber dari Kantor Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau)

Dari data di atas jumlah yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai begitu banyak di karenakan sebagian masyarakat sudah terdata di data bantuan lainnya, berikut dana bantuan selain dari dana bantuan langsung tunai.

Tabel 1.2 Dana penerimaan Bantuan pkh di desa kota intan kecamatan kunto darussalam

No	Dusun	Jumlah penerima	Jumlah tidak menerima
1	Sei merah	37 kk	294 kk
2	Sei rumanio	59 kk	128 kk
3	Manggis sebatang	31 kk	211 kk
Jumlah		127 kk	633 kk

(Sumber Dari Kantor Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu,Riau)

Dari data diatas jumlah penerima lebih sedikit di banding dana bantuan langsung tunai, masih banyaknya masyarakat yang tidak menerima bantuan sebanyak 663 kk. Berikut dana bantuan lainnya di desa kota intan.

Tabel 1.3 Dana penerima Bantuan Sosial Tunai di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten rokan Hulu.

No	Dusun	Jumlah penerima	Jumlah tidak menerima
1	Sei merah	13	281 kk
2	Sei rumanio	15	113 kk
3	Manggis sebatang	17	194 kk
	Jumlah	45	588 kk

(Sumber Dari Kantor Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rikan Hulu, Riau)

Dari data di atas jumlah yang tidak menerima bantuan sebanyak 588 kk. Penulis mengemukakan fenomena yang terjadi di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Roka Hulu yaitu:

Fenomena yang terjadi di Desa Kota Intan dalam suasana wabah covid-19 adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai didesa kota intan.
2. Masih kurang peduli dan pahamnya masyarakat desa tentang adanya bantuan langsung tunai di desa kota ntan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tartarik menfokuskan penelitian ini lebih lanjut tentang “ Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di atas selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu “ Bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui Hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di desa Kota Intan kecamatan. Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat mengacu pada perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya inventaris penelitian ini di bidang yang bersangkutan
- b. Manfaat bagi kepentingan akademis, bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang Bagaimana efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa kota intan kecamatan. Kunto Darussalam kabupaten Rokan hulu, Riau dalam suasana wabah covid-19. Serta penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa

dan informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan di laksanakan penelitian pada kasus yang sama

- c. Manfaat praktis, sebagai pengetahuan baik bagi diri sendiri, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan yang bersangkutan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “ Efektivitas ” Maka penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang di hadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai karangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

1. Konsep pemerintahan

Secara umum, pengertian pemerintah adalah proses atau pemerintah dalam menjalankan wewenangnya berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintah. Sedangkan dikatakan sebagai sesuatu disiplin ilmu pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia ataupun forma, universal sifatnya, sistematis secara spesifik(khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung,

kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian dalam arti luasnya adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lambaga/ dinas pemerintahan umum di susun dan difungsikan, baik secara internal maupun kelar terhadap para warganya.

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, kecil apapin kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu krhidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah didalamnya. (S.H.Sarundajang,2002:5)

Menurut Samul Edward finer mengakui ada pemerintah dan pemerintah dalm arti luas dan sempit yakni:

- a. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu:perbuatan oemerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu presiden dibantu oleh para mentri-mentrinya dalam rangka mencapai tujuan Negara

- b. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu: perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara.

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari Bahasa Yunani “kubernam” atau nahkoda kapal artinya, menetap kedepan lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang akan di selenggarakan untuk mencapai tujuan negara maupun tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat tujuan yang telah di tetapkan dalam Supriyanto(2009;21)

Menurut Ermaya Suradinata(1998:6) Pemerintahan adalah badan-badan public yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan public tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan negara.

Dalam Bahasa Inggris, pemerintahan di sebut government(latin gubernare, greek kybernan, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan) (dalam ndraha,2010;7). Sedangkan dalam Bahasa Indonesia pemerintahan berasal dari kata “perintah” mengandung arti yaitu menyuruh dan memerintah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perintah atau apa yang diperintah oleh pemerintah. Dengan demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yaitu yang memerintah mempunyai kekuasaan menyuruh kegiatan dari kata

perintah atau disuruh. Artinya yang memerintah mempunyai kekuasaan menyuruh kegiatan yang bersifat perintah.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintahan wajib melayani.

Menurut Haryanto, dkk mengemukakan bahwa pemerintah secara fungsional ialah system pengukur dan organisasi dari beberapa macam fungsi yang di jalankan atas dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah Negara.

Menurut Bagir Manan (dalam Chaidir 2008,85) bahwa pemerintah diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan suatu organisasi. Dalam organisasi Negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan eksekutif, legislative, yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003,7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha ilmu pemerintahan dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Awang dan Mendra Wijaya pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.

Budiarjo (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijaksanaan dan pembagian alokasi.

Dalam pandangan lain, pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara, Ndaraha (dalam labolo:2010:34).

Menurut Syafie Inu Kencana pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memperlakukan badan eksekutif. Pengaturan badan legislative, kepemimpinan, dan juga keordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut C.F Strong, pemerintahan dalam arti luas merupakan setiap aktifitas badan badan public yang terdiri dari aktifitas-aktifitas ataupun kegiatan eksekutif, legislative, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara.

Menurut ryaas rasyid, tujuan utama di bentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak di adakan melayani dirinya sendiri, Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut kitab suci Al-quran (3:104) pemerintah adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang di kenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang di bagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren dalam undang undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideology Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhinika Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

2. Good governance

Kooiman (dalam Sedarmayanti, 2009:273:) bahwa Governance adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Istilah “governance” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah good governance yaitu pemerintahan yang baik.

Governance merupakan terminologi yang digunakan menggantikan istilah government, menunjukkan penggunaan otoritas politik dalam mengelola masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator, dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama governance adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. Governance berarti proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan di implementasikan atau tidak di implementasikan.

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah.

MM. Billah (dalam Azra 2003: 180), istilah good governance merujuk pada arti asli kata governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Sedangkan, Taylor (dalam Azra 2003: 181) menegaskan bahwa good governance adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya.

Konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (civil society).

Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:

1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakan Hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Responsif (Responsiveness)
5. Orientasi Kesepakatan (ConsensusOrientation)
6. Keadilan (Equity)
7. Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa good governance adalah suatu pemerintahan yang baik yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (civil society) dengan menggunakan sembilan prinsip yang telah disebutkan

3. Konsep Efektifitas

Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karna keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas . efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung di hubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Martoyo (2002) Efektifitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak di capai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Gibson mengatakan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang di buat sehubungan dengan presentasi individu, kelompok dan organisasi (dalam Mamawi,2003;40).

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektifitas, sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan outpun
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Siagian (2002:169) menambahkan bahwa ada tujuh elemen kunci dalam suatusistem penilaian efektifitas yaitu:

1. Suatu penilaian adalah kinerja para pegawai sehingga diperoleh informasi akurat tentang kinerja berikut.
2. Standar efisiensi kinerja digunakan sebagai alat ukur.
3. Alat pengukuran efisiensi kinerja ciri-cirinya adalah mudah digunakan, dapat dipercaya, menunjukkan perilaku yang kriterial, dapat didiversifikasi oleh orang lain, mengukur kinerja yang ditampilkan secara regular.
4. Menghasilkan penilaian efisiensi kinerja yang objektif
5. Hasil penilaian kinerja tercatat secara akurat dan lengkap dalam arsip kepegawaian setiap pegawai.
6. Bahan informasi yang diperoleh dari penilaian efisiensi kinerja akan digunakan oleh organisasi untuk berbagai kepentingan pengambilan keputusan.
7. Penilaian efisiensi kinerja merupakan kegiatan yang sifatnya siklikal, artinya terjadi secara berkala dalam kehidupan kekarayaan seseorang dalam suatu organisasi.

Menurut fathoni (2006:29), mengatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan sarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu, tepat pada waktunya. Berarti efektifitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi.
2. Jumlah dan mutu barang dan jasa yang harus di hasilkan telah di tentukan

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu sudah ditetapkan
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan

Menurut Sondang P. Siagian (2002:151) efektifitas adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Menurut Effendi efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang di tetapkan dan jumlah personil yang ditentukan (Effendi,2003:14).

Menurut Sumardi (2005:105), efektifitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang di tetapkan.

Menurut Hari Lubis dan Huseini efektifitas adalah kesatuan dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, memiliki tujuan tertentu dan batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Sadad (2014:41) mengatakan efektifitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai factor dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Untuk membuat konkren (dapat diukur) banyak kriteria yang dapat digunakan, meliputi:

1. Pemanfaatan sumber daya
2. Kepuasan kerja
3. Kemampuan ber laba

4. Kemampuan adaptasi
5. Produktifitas kerja

Subkhi dan jauhar (2013;247) efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Berarti bahwa efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Dun Can efektifitas adalah seberapa tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya. Ada beberapa ketentuan untuk mencapai keaktifitasan yaitu :

1. Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandangi sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu jangka waktu pencapaian di tentukan dan sasaran merupakan target konkrit.
2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri yang di lakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana

Jadi jelaslah bahwa efektifitas merupakan usaha yang dapat berhasil tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk public dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat, dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercemin pada berbagai dimensi kehidupan pablik.

Menurut Carl Federick sebagaimana dikutip leo agustino(2008:7) mendefinisikan kebijakan berbagai serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup prilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasana mempunyai hasil akhir yang akan di capai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang berbersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan ini dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif

Menurut Richard rose (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternative yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Friendrich, mendefinisikan kebijakan sebagai seangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

M. Solly Lubis (2007) mengatakan wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran atau pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang di ambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.

Anderson (wahab, 2005-3) kebijakan sebagai langkah yang secara sengaja di lakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternative yang tersedia.

Dari beberapa pengertian kebijakan negara beberapa elemen penting tentang kebijakan negara (public policy), yaitu:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Eksternalitas Covid-19 sangat berdampak pada masalah ekonomi, terutama pada masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah harus

mengambil tindakan melalui kebijakan strategis dalam mengatasi masalah ini. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui konsep kebijakan strategis dalam menghadapi eksternalitas ekonomi pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menitikberatkan pada kajian tentang eksternalitas ekonomi Covid-19, khususnya pada masyarakat rentan, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan strategi pengumpulan data adalah dengan memetakan isu, memetakan kebijakan, dan menemukan strategi pemetaan.

Berdasarkan sistematika dan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan tiga kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi sebagai kebijakan sistematis dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

5. Konsep kesejahteraan

kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa Sansekreta “cetera” yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang

tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Friedlander (1980) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-

lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Lokshin dan Ravallion (2000), kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain: lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat independensi, semangat hidup, dan leisure.

Inti kesejahteraan menurut Sen (2006) adalah kapabilitas. Setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga mereka dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang capable. Semakin besar kapabilitas maka semakin besar pula kebebasan dalam merespon peluang-peluang yang ada. Pengembangan kemampuan (kapabilitas) manusia berkaitan dengan peningkatan harapan hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna (sejahtera).

6. Konsep Bantuan Sosial

Bantuan social adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/ masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka mulai tahun anggaran 2009 mengenai bantuan keuangan partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) peraturan menteri keuangan nomor 168/Pmk.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian/lembaga, perlu menetapkan peraturan menteri social tentang mekanisme pelaksanaan di lingkungan kementerian social.

Pada tanggal 27 Juli 2011 dalam rangka melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No. 32 Tahun 2011).

Salah satu usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan subsidi Bbm (Pkps-Bbm) yaitu Bantuan Langsung Tunai yang berlandas pada inspres No. 12 th 2005 yang secara umum mengatur tugas-tugas menteri dan kepala Bps agar pelaksanaan BLT berjalan lancar dan tertib.

7. Konsep Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan sejumlah uang yang diberikan pemerintah ke masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Karateria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibuat pemerintah, yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang cukup dan sudah lanjut usia, karna keteria seperti yang di jelaskan pada inpres No.12 tahun 2005 tidak dijumpai di desa tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Menurut ikhsan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian yaitu teori, konsp-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, pelajar harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu

No	Junal	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4
1	Nugroho kusuma/ Analisis efektifitas pelaksanaan program bantuan langsung tunai(BLT) di kelurahan ngadirejo kecamatan kartasura	bedanya lokasi penelitian , ekonomi di masa pandemic ini, variable dan konsep.	kurangnya ekonomi pada masyarakat setempat
2	Retno Widaningsih/ Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Studi kasus di: kecamatan prembun,kabupaten kobumen, jawa tengah.	bedanya lokasi penelitian , ekonomi di masa pandemic ini, variable dan konsep.	kurangnya ekonomi pada masyarakat setempat

1	2	3	4
3	Ade Ervina Suryani/ Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di kelurahan kampung baru kecamatan medan maimoon kota medan	bedanya lokasi penelitian , ekonomi di masa pandemic ini, variable dan konsep.	kurangnya ekonomi pada masyarakat setempat
4.	Harwidiensyah/ Dampak Bantuan Langsung tunai terhadap Kesejahteraan terhadap Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Bedanya lokasi penelitian, ekonomi di masa pendemic ini, variabel dan konsep.	Kurangnya ekonomi pada masyarakat setempat dan dampak bantuan tersebut di masyarakat.
5.	Shasha Rahma Sari/ analisis program Bantuan Langsung Tunai dikabupaten Wonogiri	Bedanya lokasi penelitian, ekonomi di masa pendemi dan variabel dan konsep	kurangnya ekonomi pada masyarakat setempat

Sumber : Olahan penulis 2021

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep kejelasan antar konsep tersebut di rumuskan oleh peneliti didasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari peneliti ini dapat di bahas dengan mudah, dipahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian.

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang secara tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat yang tergolong dalam keluarga yang di bawah.

Didalam suatu organisasi sangat diperlukan manajemen untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti tujuan yang telah dibuat pemerintah untuk memberi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satu di Desa Kota Intan, terlaksananya dengan baik maka pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gambar II.1. Kerangka Pikir Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di desa kota intan kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan hulu.



Sumber: olahan penulis 2021

2.4 Operasional Konsep

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karna keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas.
2. Kesejahteraan orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin
3. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
4. Bantuan Langsung Tunai merupakan sejumlah uang yang diberikan pemerintah ke masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Karateria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibuat pemerintah, yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang cukup dan sudah lanjut usia.
5. Efektifitas dalam keberhasilan program adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya sudah bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

6. Efektifitas dalam keberhasilan sasaran adalah berhasilnya suatu tujuan yang tertuju kepada orang yang membutuhkannya.
7. Efektifitas dalam kepuasan terhadap program adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya serta membantu dalam menentukan, sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya.
8. Efektifitas dalam tingkat input dan output yaitu input masukan sedangkan output yaitu pengeluaran dalam anggaran yang diberikan dari pemerintah ke desa.
9. Efektifitas dalam pencapaian tujuan menyeluruh adalah tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya di rencana kan oleh pemerintah di titpkan ke pemerintahan desa untuk masyarakay setempat.

2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan kesimpulan dari konsep dari konsep operasional yang diharapkan dapat memepermudah penulis dalam memahami variabel penelitian yaitu Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Suasana Wabah Covid-19.

Tabel 2.2 Operasional variabel tentang Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Efektifitas adalah suatu penilaian yang di buat sehubungan dengan presentasi individu, kelompok dan organisasi (dalam Mamawi,2003)	Program	1. Keberhasilan program 2. Keberhasilam sasaran 3. Kepuasan terhadap program 4. Tingkat input dan output 5. Pencapaian tujuan menyeluruh	a. Tepat sasaran b. Tepat jumlah a. ketepatan realisasi pelaksanaan b. berjenjang oleh tim koordinasi bantuan langsung tunai a. Tercukupinya masyarakat yang kurang mampu di desa b. Sejahtera masyarakat di karnakan bantuan daripemerintah tersebut a. Input dana yang di terima oleh masyarakat b. Output Dana yang dikeluarkan oleh petugas yang memberikan bantuan a. Keberhasilan oleh suatu kelompok desa yang di rencakan berhasil b. Tujuan yang di rencakan sesuai dengan yang di arahkan oleh pemerintah

Sumber: Olahan penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penilaian ini adalah survey deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang dapat pada saat penelitian mengumpulkan data dari sampel yang mewakili responden, mengklasifikasikan analisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis tersebut terhadap masalah yang didapat saat meneliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan hasil data yang di peroleh di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tempat yang telah terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan dipilihnya tempat ini, karena menurut penulis sekitar desa kota intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ini masaih belum mengetahui apa sajakah yang telah dilakukan oleh panitia dalam melakukan

program BLT tersebut dan apasajakah hambatan-hambatannya dalam melakukan program BLT tersebut.

3.3 Informen

Peneliti menggunakan purposive sampling karena informen yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Suasana Wabah Covid-19. Berikut ini adalah informen dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Informen tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan hulu.

No	Informen	Nama	Jumlah
1	Kepala Desa	M. syukur	1
2	Kepala Dusun	Fajri	1
3	Masyarakat	- Nurhayati - Ramona - Mukhlis	3
Jumlah			5

Sumber: olahan penulis 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah merupakan suatu sumber data yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, quisioner (angket), dan observasi berupa identitas responden dan tanggapan responden bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kota Intan tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku dan lain sebagainya yang telah di keluarkan oleh instansi pemerintahan dan data sekunder ini juga didukung dengan berbagai literature, pendapat-pendapat para ahli.

3.5 Teknik pengumpulan data

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan melakukan tanggung jawab kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian karna data yang dibutuhkan belum begitu akurat dengan teknik Quisioner. Interview ini dilakukan kepada Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah di desa tersebut.

2. Observasi pengamatan langsung

Observasi pengamatan langsung merupakan teknik yang dilakukan ini dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) khususnya disekitar wilayah Desa Kota Intan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi sumber-sumber infotmasi khusus dari tulisan buku-buku, relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan peneletian.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengamatan data penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti quisioner, interview, observasi, dan setelah data terkumpul semua maka kemudian peneliti mengelompokan data tersebut di olah dengan analisi univeariate; yaitu seluruh hasil penelitian dikumpulkan kemudian ditrabulasikan kedalam bentuk table frekuensi, kemudian hasil dikaitkan dengan teori-teori yang terdapat pada daftar pustaka.

3.7 Jadwal waktu penelitian

Tabel 3.2 jadwal waktu penelitian tentang Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai covid-19 di desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																								Ket
		Desember				Januari				Februari				Maret				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	x	x	x	X	x	x	x																		
2	Seminar UP										x															
3	Perbaikan Up														x											
4	Penelitian Lapangan																	x								
5	Pengelolaan data																		x							
6	Bimbingan Skripsi																			x	x					
7	Ujian Skripsi																							x		
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001-2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2 dan H.Sukiman (Plt tahun 2016-2020) dan H.Sukiman (Bupati) Indra Gunawan (wakil Bupati) bupati terpilih yang menjabat sekarang.

Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka Daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan

ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas.

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

a. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda

Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah:

1. Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.
2. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).

Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sering dikenal dengan istilah ‘Raja itu dikurung dan dikandangan oleh Ninik Mamak’. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakulah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, bermunculan tokoh-tokoh Islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya yang cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan nasional adalah Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidin, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan dan sebagainya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan benteng yang dibuat masyarakat Dalu-dalu atas perintah dari Tuanku Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya adalah Kubu jua, Kubu manggis, Kubu joriang dan sebagainya.

a. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang, Jepang pun berkuasa di Indonesia termasuk di daerah Rokan Hulu. Pada masa Jepang, pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi setelah beberapa orang raja ditangkap oleh penjajah Jepang, maka pemerintahan dilanjutkan oleh seorang ‘kuncho’ yang diangkat langsung oleh pihak Jepang.

b. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI

Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

2. Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK". Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00°25'20-010°25'41 LU 1000°02'56-1000°56'59 BT. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- c. Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
- d. Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangun Purba
- b. Kecamatan Kabun
- c. Kecamatan Kepenuhan
- d. Kecamatan Kunto Darussalam
- e. Kecamatan Rambah
- f. Kecamatan Rambah Hilir
- g. Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rokan IV Koto
- i. Kecamatan Tambusai
- j. Kecamatan Tambusai Utara
- k. Kecamatan Tandun
- l. Kecamatan Ujungbatu
- m. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- n. Kecamatan Bonai Darussalam
- o. Kecamatan Kepenuhan Hulu
- p. Kecamatan Pendalian IV Koto

3. Lambang Kabupaten Rokan Hulu



- a. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu.
- b. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.
- c. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.
- d. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
- e. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela Marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
- f. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.
- g. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.

- h. Pita Putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
- i. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkankemakmuran.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kunto Darussalam

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Kunto Darussalam adalah - +479,96 Km² atau 47.996 Ha. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki 10 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Kota Lama. 13 Desa/Kelurahan tersebut ialah:

1. Kota Intan
2. Kota Lama
3. Bukit Intan Makmur
4. Muara Intan
5. Bagan Tujuh
6. Intan Jaya
7. Tanah Datar
8. Kota Raya
9. Kota Baru
10. Sungai Kuti
11. Pasir Indah
12. Muara Dilam
13. Pasir Luhur

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam sebanyak 51.235 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 107 jiwa/Km². Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Kunto Darussalam berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bonai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagarantapah Darussalam dan Kabupaten Kampar
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagarantapah Darussalam
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kepenuhan.

4.3 Gambaran Umum Desa Kota Intan

A. DESA KOTA INTAN

1. Profil desa

A. demografis

Desa Kota Intan adalah salah satu dari Desa-desanya yang berada di Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang masih belum banyak mengalami perubahan disegi Pembangunan fisik maupun non fisik dan juga masih banyak masyarakat yang Prasejahtera yang harus ditanggulangi bersama..

Desa Kota Intan dengan Luas Wilayah Km², yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Lama

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangkir Indah, Pagaran Tapah, dan Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo

Iklim Desa Kota Intan sebagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu iklim yang cenderung labil dalam artian curah hujan dan kemaraunya yang tidak menentu sangat berpengaruh kepada tanaman baik Pertanian maupun Perkebunan sedangkan curah hujan yang terlalu tinggi akan berdampak negatif kepada jalan Petani yang masih belum mendapatkan pengerasan.

B. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Kota Intan didominasi oleh Penduduk asli yang bersuku Melayu; dan pendatang yang bersuku Mandahiling, Batak, Karo, Nias, Aceh, Minang, Jawa dan Lombok.

Dan Penduduk Desa Kota Intan berjumlah 2.810 Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 1.517 Jiwa dan Perempuan 1.293 Jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga 886 KK, yang terbagi dalam 3 Wilayah Dusun yaitu :

1. Dusun I Sei.Merah
2. Dusun II Manggis Sebatang
3. Dusun III Sei Rumanio

Penggunaan tanah di Desa Kota Intan sebagian besar dipergunakan untuk Kebun Kelapa sawit dan Karet dan sisanya yang merupakan Lahan Kering dipergunakan untuk pemukiman warga yaitu Bangunan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Desa Kota Intan secara garis besar adalah sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA DESA KOTA INTAN

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Kantor Desa	1 Unit	
2	Kantor BPD dan PKK	1 Unit	Masih Gabung
3	SD Negeri	2 Unit	
4	Rumah Dinas Sekolah	2 Unit	
5	MDA / PDTA	1 Unit	
6	TK	1 Unit	
7	PAUD	3 Unit	
8	MTs.Swasta	1 Unit	
9	Pustu	1 Unit	
10	POSYANDU	3 Buah	1(Satu) Gedung lainnya masih menumpang
11	Masjid	1 Unit	
12	Surau Suluk	1 Unit	
13	Surau	9 Unit	
14	Pasar Desa	1 Unit	
15	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	
16	Sumur Gali	234 Unit	
17	Jalan Tanah	18.000 Meter	
18	Jembatan Kayu	6 Unit	
19	Box Culfer	7 Unit	
20	Jembatan Gantung	1 Unit	

Sumber dari kantor kepala desa

C. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kota Intan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah tangga yang berkategori Sangat Miskin, Miskin, Sedang dan kaya. hal ini disebabkan karena mata pencahariannya yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti Petani, Buruh tani, Tukang bangunan, Buruh bangunan, Buruh Harian Lepas dan Pedagang dan sebagian daripadanya ada disektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Karyawan Swasta / BUMN dan Tenaga Medis.

D. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah Desa Kota Intan dibagi menjadi 3 (Tiga) Dusun, yaitu Dusun I Sei.Merah, Dusun II Sei.Rumanio, Dusun III Manggis Sebatang dan setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam terdiri dari Sistem Pemerintah Desa, Sistem Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sistem Kelembagaan Desa.

Pemerintah Desa Kota Intan yang meliputi antara lain :

- a. 1(Satu) Orang Kepala Desa.
- b. 1 (Satu) Orang Sekretaris Desa,
- c. 4(Empat) Orang Kepala Urusan,

- d. 3(Tiga) Orang Kepala Dusun.

Badan Permusyawaratan Desa Kota Intan yang meliputi antara lain :

- a. 1 (Satu) Orang Ketua BPD
- b. 1 (Satu) Orang Wakil Ketua BPD1 (Satu) Orang Sekretaris BPD
- c. 2 (Dua) Orang Anggota BPD

Kelembagaan Desa Kota Intan yang meliputi antara lain :

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Seksi
- b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 15 Pengurus
- c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 7 Pengurus
- d. Karang Taruna yang terdiri dari 11 Orang Pengurus
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 46 Orang Pengurus
- e. Lembaga Kerapatan Adat (LKA) ada 10 petugas

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas informan

Informan yang terdapat di dalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan di dasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang di maksud sudah penulis dianggap memberikan jawaban dengan fenomena yang terjadi saat ini. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Terlebih Dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin informan

Jenis kelamin juga mempengaruhi responden yang bersangkutan dalam bekerja, dimana yang masuk dalam organisasi desa atau aparat desa kebanyakan pria. Dan masyarakat kebanyakan wanita yang mendapatkan bantuan tersebut.

Tabel 5.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin penelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Jumlah
1.	M.Syukur	Laki laki	Kepala desa	1
2.	Fajri	Laki laki	Kepala dusun	1
3.	Ramona Mukhlis Nurhayati	Perempuan Laki laki Perempuan	Masyarakat Masyarakat Masyarakat	3
Jumlah				5

Sumber: dari penelitian lapangan 2021

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan responden penelitian laki laki sebanyak 3 orang dan untuk informan perempuan berjumlah 2 orang. Pada tabel di atas terlihat sedikit bnyak laki-laki ketimbang perempuan. Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang benar. Karna jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir seseorang terhadap suatu penelitian.

2. Identitas berdasarkan umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas resoponden penelitian berdasarkan umur.

Tabel 5.2 Umur informan pemnelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

NO	UMUR	JUMLAH
1	30-40	2
2	41-50	2
3	51-60	1
Jumlah		5

Sumber: hasi penelitian, 2021

Dilihat dari tabel diatas, dalam pengelompokan identitaas berdasarkan umur informan di desa kota intan, maka penulis dapat mengemukakan bahwa pada 5 (lima) orang yang di jadikan informan. Ada 2 (dua) orang yang berumur 30-40 tahun, ada 2 (dua) orang yang berumur 41-50 tahun dan ada 1(satu) orang yang berumur 51-60 tahun.

3. Identitas informan berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan seseorang dalam perusahaan ataupun kantor pemerintahan. Tingkat pendidikan juga mengetahui pola pikir seseorang dalam berbicara atau pun dalam mengambil sebuah keputusan. Dari hasil penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat di ketahui tingkat pendidikan para informan yang masuk dalam ruang lingkup penelitian dapat di lihat pada table dibawah ini. Dari hasil wawancara dilapangan, maka di peroleh identitas informan penelitian pendidikan.

Tabel 5.3 Tingkat pendidikan informan penelitian tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

NO	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	Tidak sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	5
5	STRATA 1	-
Jumlah		5

Sumber : hasil penelitian, 2021

Seperti yang dilihat di tabel atas dapat di ketahui tingkat pendidikan informan dari 5(lima) orang di desa kota intan ini berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) semua. Termasuk Kepala desa itu sendiri dan juga 4(empat) di ataranya dusun dan masyarakat desa kota intan.

A. Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini mengetahui bagaimana Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Masih ada banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan dana bantuan langsung tunai tersebut. Tugas pemberian dana Bantuan Langsung Tunai harus teliti dan secara adil agar masyarakat merasa lebih setara dan hidup yang sedikit terbantu dengan adanya Bantuan tersebut dari pemerintahan. Adapun beberapa jabatan yang langsung turun tangan pemberian dana Bantuan Langsung Tunai didesa tersebut. Yakni, Kepala Desa, kepala dusun, Petugas pemberian dana tersebut harus mengetahui berapa jumlah dana yang di cairkan oleh pemerintrah untuk desa.

Di kota intan daerah yang lumayan banyak penduduknya, jadi karna adanya covid 19 dan pekerjaan di PHK maka penggangguran atau kehilangan mata pencarian banyak di desa tersebut. Bantuan Langsung Tunai diturunkan oleh pemerintahan untuk desa. Dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, maka perlu kiranya kantor kepala desa beserta staf-stafnya untuk memperketat persyaratan agar lebih percaya masyarakat tersebut.

Dari data yang di peroleh oleh penulis dari hasil wawancara pada informan maka penulis akan mengajukan hasil wawancara dalam bentuk uraian mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai covid 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Maka dapat dilihat indikator variabel berikut ini:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini telah melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang yang telah ditetapkan oleh penulis.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program bantuan langsung tunai (BLT) dinyatakan berhasil apabila mencapai tujuan dari bantuan langsung tunai itu sendiri, dimana tujuan dari bantuan langsung tunai (BLT) adalah membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Desa Kota Intan yaitu M.Syukur menjelaskan tujuan keberhasilan apakah sudah tercapai di desa kota intan :

“Tujuan Bantuan Langsung Tunai ini adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Dan setelah di laksanakannya program Bantuan Langsung Tunai ini masyarakat kurang mampu benar benar terbantu, itu sama artiannya dengan tujuan dari Bantuan Langsung Tunai tersebut telah berhasil di Desa Kota Intan ini” (bapak M.Syukur, dikantor desa)

Berdasarkan tanggapan dari Bapak M.syukur mengenai tujuan keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai di desa tersebut sudah tercapai

dengan lancar dan baik, selain itu M.Syukur juga bertanggung jawab besar dalam berjalannya bantuan ke desa-desa. Disini bapak M.Sukur menjelaskan pembagian bantuan langsung tunai apakah tepat pada sasaran, berikut tanggapannya :

“penerimaan bantuan langsung tunai tersebut tepat sasaran terhadap masyarakat di desa kota intan berdasarkan kreteria dan sudah di seleksi menurut desa dan di pilih siapa saja yang berhak mendapatkannya” (jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan wawancara terkait pembagian bantuan langsung tunai tepat pada yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut dan di seleksi oleh kepala desa dan lainnya. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas penulis melakukan wawancara kepada Bapak Fajri selaku kepala dusun di desa kota intan, berikut tanggapannya :

“penerimaan bantuan tersebut telah di seleksi oleh staf-staf kantor kepala desa dengan kreteria yang di kumpulkan oleh masyarakat itu sendiri dan di data langsung oleh kepala desa dalam beberapa waktu sesudah itu baru di beritahukan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut” (jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajri selaku kepala dusun di desa kota intan menyampaikan bahwa bantuan tersebut adanya syarat-syarat atau kriteria yang di cantumkan. Kemudian diseleksi oleh staf di kantor desa bersama kepala desa untuk memilih siapa yang mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai pembagian bantuan langsung tunai terhadap masyarakat tepat pada jumlahnya,

dilakukan wawancara dengan M.Syukur selaku Kepala Desa, berikut tanggapannya :

“Tepat dan lancar dengan Dana yang di dikeluarkan oleh pemerintah untuk desa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai adalah Rp.600.000 sebulan selama tiga bulan di desa kota intan”(jum’at 03 september)

Berdasarkan wawancara dengan M.Syukur kepala desa menjelaskan pembagian dana dari pemerintah sekitar Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya wawancara bersama Fajri selaku kepala dusun kota intan tentang pembagian bantuan langsung tunai terhadap masyarakat tepat pada jumlahnya, berikut tanggapannya :

“dana dari pemerintah yang diberikan terhadap masyarakat yang kurang mampu senilai Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan lamanya” (jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajri selaku Kepala Dusun tersebut terdapat kesamaan dengan M.Syukur selaku Kepala Desa tentang dana yang diberikan oleh pemerintah kemasyarakat senilai Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan, selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelasnya tentang jumlah Bantuan Langsung Tunai yang diterima masyarakat di desa tersebut, saudara mukhlis selaku masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai,berikut tanggapannya:

“saya penerima Bantuan Langsung Tunai dengan dana yang di dapati oleh saya sendiri sejumlah Rp.600.000 sebulan selamat tiga bulan”

Berdasarkan wawancara dengan saudara mukhlis selaku masyarakat desa kota intan yang mendapatkan bantuan langsung tunai menjelaskan bahwa dana yang didapatkan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai adalah sebesar Rp.600.000 sebulan selama tiga bulan. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat lainnya yang mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut jawabannya pun sama dengan saudara mukhlis.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informen mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dalam keberhasilan program sangat baik mana tercapainya suatu tujuan Bantuan Langsung Tunai berjalan dengan lancar dan juga tepat pada sasaran yang telah di seleksi dan di data oleh petugas desa ataupun para aparat-aparat desa, jumlah yang di bagikan juga tepat secara yang mendapatkn bantuan tersebut yaitu senilai RP.600.000 setiap bulannya selama tiga bula belakangan ini.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada hari jum'at 03 september 2021, penelitian menyimpulkan dari indikator yang pertama tentang keberhasilan program. Sejauh ini keberhasilan program sudah berhasil di karnakan sasaran dan jumlah yang sangat tepat, dan dibuktikan oleh aparat-aparat desa berserta masyarakat setempat.

2. Keberhasilan Sasaran

Sasaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat kurang mampu non pkh atau bantuan pangan non tunai (BPNT) yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kehilangan mata pencarian
2. Belum ada terdata sama sekali dengan bantuan lain
3. Mempunyai rerntan keluarga yang sakit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan M.Syukur sebagai Kepala Desa Kota Intan untuk menentukan keberhasilan sasaran di desa kota intan terhadap masyarakat-masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, berikut tanggapannya:

“berhasil karna Sasaran Bantuan Lngsung Tunai di Desa Kota Intan di saring sedemikian rupa agar penerima Bantuan Langsung tunai tersebut benar benar tepat pada sasarannya Orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai kami seleksi dan penerima bantuan-bantuan lainnya seperti PKH Dan bantuan lainnya tidak dapat menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut supaya tidak terjadi penerimaan yang tidak rata dan yang menerima Bantuan langsung tunai tersebut tidak pernah menrima bantuan yang lainnya” (jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan tanggapan dari Bapak M.Syukur perihal sasaran yang mendapatkan bantuan langsung tunai di saring agar masyarakat yang menerima bantuan tidak termasuk dalam bantuan langsung tunai tersebut dan juga tidak terjadi dua kali pembagian bantuan ke masyarakat yang sebelumnya telah

mendapatkan bantuan. Selanjutnya penulis menanyakan kepada saudara mukhlis tentang sasaran penerima bantuan langsung tunai, berikut tanggapannya :

“saya sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi karna adanya covid19 pemerintah menurunkan bantuan langsung tunai ini saya mendapatkan karna saya termasuk kehilangan mata pencarian dan saya hanya menerima BLT tidak penerima PKH atau pun bantuan lainnya. adanya bantuan tersebut di desa kota intan ini kami di suruh melengkapi persyaratannya contohnya kartu keluarga (kk) dan kartu tanda penduduk (ktp) dan di pilih oleh staf-staf desa yang bertugas tentang pembagian dana bantuan”(jum’at 03 september 2021)

Selanjutnya penulis menanyakan kepada M.Syukur selaku Kepala Desa tentang siapa saja tim pembagian bantuan langsung tunai di desa kota intan, berikut pendapatnya:

“ setiap bulannya yang membagikan dana Bantuan Langsung Tunai tersebut yaitu kepala desa, kepala dusun, rt dan rw nya agar dilihat dan diberikan langsung kepada yang berhak”(jum’at 03 september)

Berdasarkan jawaban dari bapak M.Syukur selaku Kepala desa kota intan pembagian bantuan langsung tunai di bagikan kerumah masyarakat yang mendapatkannya dengan bantuan tim kantor desa. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya penulis wawancara Ibuk nurhayati selaku masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai di kota intan tentang siapa saja tim pembagian bantuan langsung tunai, berikut tanggapannya:

“pada saat pembagian dana dari pemerintah yang mengantarkan dana bantuan langsung tunai sebagian dari staf-staf desa dimana antaranya, kepala desa, kepala desun dan rt/rw dan di berikan kepada kami sendiri”(jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan Wawancara di atas program Bantuan Langsung Tunai sudah berhasil sasaran dimana orang-orang yang menerima bantuan langsung tunai di desa kota intan adalah orang yang benar-benar tepat pada kreteria tersebut sehingga penerima bantuan di desa kota intan merata tanpa adanya yang menerima bantuan lebih dari satu. Pembagian dana langsung tunai juga di terima langsung oleh penerima bantuan tersebut melalui dengan kepala desa, kepala dusun dan rt/rw di desa.

Jadi disimpulkan dari wawancara di atas program Bantuan Langsung Tunai sudah berhasil sasaran dimana orang-orang yang menerima bantuan langsung tunai di desa kota intan adalah orang yang benar-benar tepat pada kreteria tersebut sehingga penerima bantuan di desa kota intan merata tanpa adanya yang menerima bantuan lebih dari satu. Pembagian dana langsung tunai juga di terima langsung oleh penerima bantuan tersebut melalui dengan kepala desa, kepala dusun dan rt/rw di desa.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti yang dilakukan di kerumah-rumah masyarakat dan di kantor desa kota intan kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai pada tanggal 03 september 2021, penelitian menyimpulkan bahwasanya indikator keberhasilan

sasaran di desa Kota Intan bagus karna tepat pada sasaran dan di seleksi penerimaan dana Bantuan langsung tunai tersebut.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program dapat di lihat dari masyarakat-masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai karena adanya bantuan tersebut bisa membantu kehidupannya sehari-hari lebih tercukupi dari yang sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai yang bernama saudari ramona selaku masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai, berikut tanggapannya :

“selama adanya covid 19 ini bnyaknya pemerintah menurunkan bantuan ke desa-desa sampai bantuan langsung tunai ini berupa uang tunai dan saya menerimanya benar-benar merasa puas dengan bantuan dari pemerintah karna saya merasa terbantu dengan dana yang diberikan”(jum’at 03 september 2021)

Berdasarkan pernyataan saudari ramona mengenai kepuasan terhadap program dari pemerintah tersebut merasa sangat terbantu dengan keadaan sekarang ini sebagiannya juga di rasakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai, ibuk nurhayati juga menjawab dengan sama seperti saudari ramona terasa terbantu dengan sangat senang, berikut tanggapannya:

”saya sangat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai ini saya merasa terbantu dalam sehari hari karna pandemi sekarang ini atau kemaren tidak bisa kemana mana maka bnyaknya bantuan dari pemerintah”(jum’at 03 september 2021)

Kemudian wawancara berikutnya penulis menanyai ke Bapak M.Syukur selaku kepala desa tentang kepuasan terhadap program, berikut tanggapannya:

“Kamipun selaku pelaksana bantuan langsung tunai merasa puas sekali bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan merasa puas karna tujuan dari program blt ini berhasil dan masyarakat terbantu.(jum'at 03 september 2021)

Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informen yaitu masyarakat kota intan itu sendiri tentang kepuasan terhadap program di desa ini merasa puas di karna kan masyarakat yang mendapatkannya merasa terbantu dengan adanya bantuan yang begitu besar dan bisa menolong kehidupannya sehari-hari. Begitu pula kepala desa Kota Intan dan para-para staf merasa puas atas program yang di berikan oleh pemerintahan selama covid 19 ini membuat masyarakat kota intan merasa sangat terbantu dan dan membuat masyarakat hidup yang sedikit sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di masyarakat di desa kota intan kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu pada hari jum'at 03 september 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator kepuasan terhadap program di desa kota intan sangat baik dan masyarakat-masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut merasa sangat puas akan adanya bantuan dari pemerintah tersebut.

4. Input dan Output

Tingkat input dan output yang di dapatkan oleh pemerintah desa yang di bagikan kepada masyarakat setempat. Di sini peneliti menanyai tentang dana yang

di cairkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan M.syukur sebagai Kepala Desa Kota Intan, mengatakan :

“dana yang di terima oleh masyarakat adalah Rp.600.000 sebulan selama tiga bulan ditetapkan oleh pemerintah dan di bagikan ke pada masyarakat yang menerima bantuan itu sendiri”(jum’at 03 september 2021)

Dari hasil wawancara dengan M.Syukur selaku kepala desa kota intan menyatakan dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk di bagikan kepada masyarakat senilai Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan. Lalu penulis juga menanyai kepada Bapak Fajri selaku kepala dusun desa kota intan, berikut tanggapannya:

“ saya selaku kepala dusun ikut serta dalam membagikan dana Bantuan Langsung tunai kami berikan kepada masyarakat senilai Rp.600.000 yang telah di tetapkan oleh pemerintahan”(jum’at 03 september 2021)

Dari hasil wawancara bersama kepala dusun juga adanya kesamaan terhadap jumlah dana yang di berikan kepada masyarakat. Yang telah di tetapkan pemerintah senilai Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan dan juga terdapat di desa-desa lain selain kota intan juga mendapatkan bantuan sebesar yang sama. Terakhir penulis menanyai kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai, untuk lebih jelasnya kita tanya kan kembali kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan yaitu saudari ramona, berikut tanggapannya:

“dana Bantuan Langsung Tunai yang kami terima dari desa senilai Rp.600.000 sebulan selama tiga bulan”(jum'at 03 september 2021)

Jadi dapat disimpulkan dari indikator tingkat input dan output telah dilakukan sesuai dengan pemerintah utuskan. Pemerintah desa juga memberikan sejumlah uang yang sama dengan dengan aturan yang di berikan oleh pemerintah yaitu Rp.600.000 sebulan selama tiga bulan. Dana ini juga di berikan langsung kepada masyarakat tidak ada nya yang di tutup-tutupi. Setelah peneliti telusuri tidak hanya desa kota intan yang menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp.600.000 tersebut tetapi desa desa lain juga mendapatkan yang sama. Berarti tingkat input dan output yang di berikan pemerintah kepada masyarakat sama rata dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor kepala desa kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu pada hari juma'at 03 september 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator tingkat input dan output di desa kota intan, sejauh ini bantuan yang masuk ke desa sudah berjalan dengan baik dan merata dengan jumlah yang sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Tercapainya tujuan menyeluruh di karnakan Kepala desa,seluruh aparat desa dan masyarakat desa itu sendiri merasa puas akan adanya program tersebut apa bila adanya kendala belum bisa di namakan dengan pencapaian tujuan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan M.Syukur sebagai kepala desa kota intan tentang apakah program Bantuan langsung Tunai di lakukan tercapai, M.Syukur selaku kepala desa kota intan, berikut mengemukakan:

“program Bantuan Langsung Tunai di desa Kota intan ini tercapai bisa di lihat dari masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan saya sebagai kepala desa juga merasa telah tercapai dengan cara seleksi dan juga tepat sasaran dan tepat jumlah yang di berikan”(jum’at 03 september 2021)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Syukur selaku kepala desa mengatakan bahwa program bantuan langsung tunai di desa tersebut telah tercapai dengan melihat bnyaknya masyarakat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, untuk lebih mengetahuinya wawancara peneliti selanjutnya kepada pak Fajri selaku Kepala Dusun di desa kota intan, mengatakan :

“menurut saya sebagai kepala dusun di desa kota intan ini program Bantuan Langsung Tunai di desa Kota intan ini tercapai, karna masyarakat di desa kota intan ini merasa sangat terbantu akan adanya bantuan, saya juga merasa senang apabila masyarakat didesa ini merasa puas akan adanya dana yang di berikan pemerintahan melalui desa”(jum’at 03 september 2021)

Menurut kepala desa dan kepala dusun dalam wawancara pencapaian tujuan menyeluruh. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai saudari Ramona mengatakan:

“Adanya bantuan ini menurut saya tujuan pencapaian tujuan menyeluruh tersebut tercapai di karenakan saya sendiri meras terbantu sekali dengan adanya dana yang di berikan pemerintah.” (jum’at 03 september 2021)

Jadi bahwasanya program bantuan di desa kota intan berjalan dengan baik dan telah tercapainya tujuan menyeluruh di lihat dari tanggapan kepala desa, kepala dusun dan masyarakat sangat nampaknya terlihat terbantu oleh adanya bantuan tersebut salah satunya masyarakat.

Jadi dapat di simpulkan oleh peneliti dari wawancara bersama kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai tersebut sudah tercapai karna masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut sedangkan tujuan bantuan langsung tunai ini membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis di desa kota intan pada hari jum’at 03 september 2021, peneliti menyimpulkan dari pencapaian tujuan menyeluruh di desa kota intan sudah tercapai dengan baik dan di bukti kan oleh masyarakat-masyarakat yang mendapati bantuan langsung tunai tersebut dengan jumlah yang sangat banyak tidak hanya di desa tersebut tetapi di seluruh desa yang ada di kecamatan kuntodarussalam tersebut.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disampaikan faktor penghambat terhadap Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid 19 di Desa Kota Intan

Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu hal tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

1. Hambatan dalam indikator keberhasilan sasaran yaitu adanya beberapa petugas yang merasa sulit dalam memilih masyarakat walaupun pemilihannya secara seleksi karna yang mendapatkan bantuan langsung tunai tidak boleh sebelumnya masuk dalam data bantuan lainnya.
2. Hambatan dalam indikator kepuasan terhadap program yaitu masyarakat merasa puas karna adanya bantuan langsung tunai tetapi masyarakat hanya bisa mendapatkan bantuan sekali dari beberapa bantuan yang lainnya. Jadi masyarakat yang menerima bantuan yang lain tidak akan mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.
3. Hambatan indikator tingkat input dan output yaitu masyarakat tidak tahu berapa dana dari pemerintah karna dananya langsung di keluarkan oleh desa dan di bagikan ke masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan program dalam efektivitas program bantuan langsung tunai covid 19 di desa kota intan kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu dalam keberhasilan program kepada masyarakat sudah baik dan telah tercapainya dikarenakan tujuan bantuan langsung tunai di desa tersebut telah dicapai.
2. Keberhasilan sasaran program bantuan langsung tunai di desa kota intan ini berhasil di karnakan sasarannya tepat dan di seleksi dengan syarat-syarat yang telah dilampirkan.
3. Kepuasan terhadap program di desa kota intan ini sudah puas karna di buktikan oleh pemerintahan desa terutama kepala desa dan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut merasa sangat puas dan terbantunya akan adanya bantuan langsung tunai tersebut.
4. Tingkat input Dan output dana yang di berikan kedesa kota intan telah di sesuai kan dengan apa arahan dari pemerintahan dengan jumlah yang cukup besar Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh di desa kota intan sudah tercapai karna tujuan yang telah dicapai di desa tersebut. bukan Cuma di desa kota intan tetapi di satu kecamatan kunto darussalam.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkan lagi mengenai bantuan yang masuk ke desa-desa dari pemerintahan yang di salurkan melalui pemerintahan desa
2. Masyarakat akan merasa lebih terbantu akan adanya bantuan dari pemerintah, karna pemerintah desa membagikan secara adil dan seleksi. Jadi, misal adanya bantuan lagi masuk kedesa sebaiknya pemerintah desa lebih terlihat tegas dalam pemilihan.
3. Tim pelaksana bantuan langsung tunai agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang, maksud dan tujuan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di desa kota intan.
4. Sebaiknya pemerintah dalam penetapan kebijakan seperti program bantuan langsung tunai pelaksanaannya tidak berdekatan dengan pemilu agar dapat menghindari persepsi tidak baik, dan agar pelaksanaannya program bantuan ini memang untuk kepentingan masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

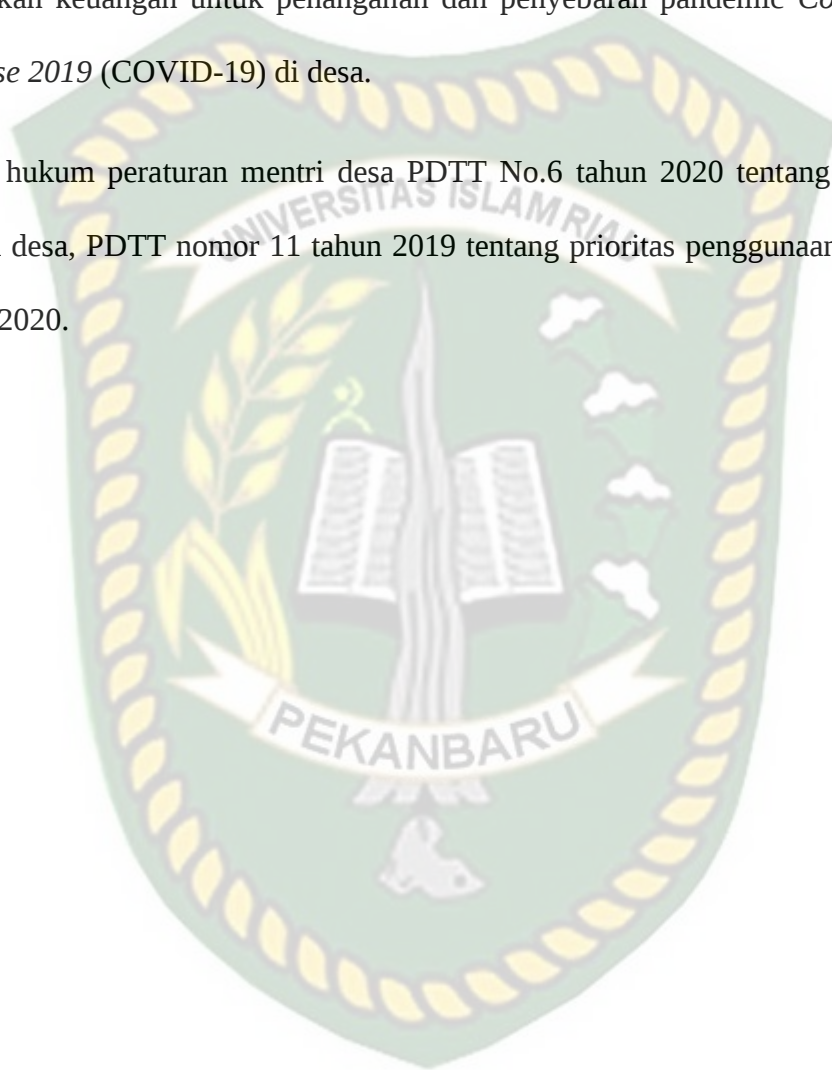
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agus Dwiyanto,solichin . 2005. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakaan negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*,Bandung:Alfabeta
- Amartya Sen, Stiglitz Joseph E, Fitoussi Jean Paul, (2011). *Mengukur Kesejahteraan*. Marjin Kiri.
- Anwas, M, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Global*,Bandung:Alfabeta
- Ermaya, suradinata,2007, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Graha, A. N. (2009). *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Modernisasi
- Hidayat, 1986, *Teori Efektifitas dalam kinerja karyawan*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas press.
- Ikhsan, Fuad, 1996, *DASAR-DASAR PENDIDIKAN*, Jakarta : PT.RINEKA CIPTA.
- Iqbal,Hasbi, 2008, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUDUS*. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kurniawansyah, Heri , 2019, *Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
- Ndraha, Taliziduhu ,2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta, Rineka cipta

- Nugroho,D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta
- Rauf , Rahyunir dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Rosfadhila , Meuthia ,2001, *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*, Lembaga Penelitian Semeru
- Ryaas Rasyid,2000. *Makna pemerintahan*.PT. Mutiara Sumber Daya Widya, jakarta
- Silalahi, Ulber.2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Rafika Aditama
- Soehartono, Irawan.2004. *MPS : Semua Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung:CV. Alfabeta
- Sugiono. 2018, *Metodelogi Penelitian*, Bandung (kuantitatif, kualitatif, dan r&d) Alfabeta
- Sugiono.2005.*memahami penelitian kualitatif*.CV. Alfabeta, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama

Dokumentasi :

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu) Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di desa.

Dasar hukum peraturan menteri desa PDTT No.6 tahun 2020 tentang perubahan menteri desa, PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.



Lampiran 5 : lulus plagiasi online



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3765 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	: Yola Hermeina
NPM	: 177310097
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Covid – 19 di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Persentase Plagiasi	: 20%
Jumlah Halaman	: 73 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status	: Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).
 Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

Homid Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Indira Satri, S.Sos., M.Si
 NPK: 970702230